



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 48) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2023 sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, sehingga Perubahan Renja PD juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dan adanya kebijakan atau adanya perubahan regulasi berkaitan dengan penganggaran meliputi:

- a. Peratauran Meteri Keuangan Republlik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- d. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi 2 yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Kemampuan keuangan Daerah, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Propinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM, Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Dana Brsama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

35. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).
36. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 0000) ;
37. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan;
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Dinas Sosial. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2023 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan Dinas Sosial Pada Tahun 2023, ada 7 (tujuh) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 8.104.961.165,- realisasi sebesar Rp. 4.283.294.106,- atau 52,84 %.
 - 2) Program Pemberdayaan Sosial , dari total anggaran sebesar Rp.2.860.016.350,- realisasi sebesar Rp.1.507.010.700,- atau 52,69%.
 - 3) Program Rehabilitasi Sosial, dari total anggaran sebesar Rp.1.286.327.192,- realisasi sebesar Rp.658.683.292,- atau 51,20%.

- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dari total anggaran sebesar Rp.12.057.806.721,- realisasi sebesar Rp.377.057.600,- atau 3,12%.
- 5) Program Penanganan Bencana, dari total anggaran sebesar Rp.2.038.100.000,- realisasi sebesar Rp.1.044.020.900,- atau 51,22%;
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dari total anggaran sebesar Rp. 23.178.500,- realisasi sebesar Rp.12.905.400,- atau 31,76%.

Dari 6 (Enam), yang dilaksanakan Dinas Sosial Pada Tahun 2023, ada 26 (dua puluh enam) sub. kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

• **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 209.475.693,- capaian realisasi anggaran Rp. 189.915.672 atau (90,66%);
- 2) Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 130.132.222,- capaian realisasi anggaran Rp. 3.741.400,- atau (2,87%);
- 3) Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 4.938.477.148,- capaian realisasi anggaran Rp. 2.260.738.617,- atau (45,77%);
- 4) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran Rp. 39.950.000,- capaian realisasi anggaran Rp. 19.744.800,- atau (49,42%);
- 5) Sub. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran, pagu anggaran Rp.149.058.809,- capaian realisasi anggaran Rp. 38.935.025,- atau (26,12%);
- 6) Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, pagu anggaran Rp. 54.089.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 52.409.000,- (96,89%);
- 7) Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, pagu anggaran Rp. 30.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 29.803.900 (99,34%);

- 8) Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu anggaran Rp. 25.588.400,-, dengan capaian realisasi anggaran Rp. 15.555.300,- (60,79%);
- 9) Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran Rp. 80.746.500,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 38.799.350,- atau (48,05%);
- 10) Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pagu anggaran Rp. 40.186.999,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 18.305.700,- atau (45,55%);
- 11) Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pagu anggaran Rp. 25.287.300,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 1.000.000,- atau (3,95%);
- 12) Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamun Rp. 39.968.500,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 20.054.800,- atau (50,17%);
- 13) Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu anggaran, pagu anggaran Rp. 39.968.500,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 20.054.800,- atau (50,17%);
- 14) Sub. Kegiatan Sub. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu anggaran Rp. 875.070.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 742.050.000,- atau (84,79%);
- 15) Sub. Kegiatan Sub. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran Rp. 369.268.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 195.592.000,- atau (52,96%);
- 16) Sub. Kegiatan Sub. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran Rp. 454.551.044,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 450.216.970,- atau (99,04%);
- 17) Sub. Kegiatan Sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.995.200,- dengan capaian realisasi anggaran, pagu anggaran Rp. 1.700.000,- atau (85,20%);
- 18) Sub. Kegiatan Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran Rp. 121.515.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 51.894.040,- atau (42,70%);

- 19) Sub. Kegiatan Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran Rp. 121.515.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 51.894.040,- atau (42,70%);
- 20) Sub. Kegiatan Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran Rp. 42.450.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 13.715.000,- atau (32,30%);
- 21) Sub. Kegiatan Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu anggaran Rp. 179.906.750,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 45.197.313,- atau (25,12%);
- 22) Sub. Kegiatan Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu anggaran Rp. 140.070.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 36.900.219,- atau (26,34%);

• **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

- 23) Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp.65.582.400,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 50.000.000,- atau (76,23%);
- 24) Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp.119.139.400,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 24.883.400,- atau (20,88%);
- 25) Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 1.047.891.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 437.017.800,- atau (41,70%);
- 26) Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota, pagu anggaran Rp. 222.948.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 217.008.000,- atau (97,33%);
- 27) Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), pagu anggaran Rp. 1.404.455.550,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 778.101.500,- atau (55,40%);

- **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**

- 28) Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, pagu anggaran Rp. 26.813.150,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 18.990.850,- atau (70,82%);

- **ROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

- 29) Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan, pagu anggaran Rp. 219.200.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 174.097.360,- atau (79,42%);
- 30) Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang, pagu anggaran Rp. 176.555.800,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 170.582.832,- atau (96,61%);
- 31) Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, pagu anggaran Rp. 120.160.400,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 115.856.900,- atau (96,41%);
- 32) Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, pagu anggaran Rp. 17.797.215,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 7.550.000,- atau (42,42%);
- 33) Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, pagu anggaran Rp. 133.334.200,- dengan capaian realisasi anggaran Rp 0,00,- atau (0,00%);
- 34) Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, pagu anggaran Rp. 38.116.900,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 17.560.000,- atau (45,91%);
- 35) Sub. Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, pagu anggaran Rp. 9.777.700,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 3.259.200,- atau (33,33%);

- 36) Sub. Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, pagu anggaran Rp. 99.598.914,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 15.250.000,- atau (15,31%);
- 37) Sub. Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, pagu anggaran Rp. 36.343.901,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 17.713.800,- atau (48,73%);
- 38) Sub. Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, pagu anggaran Rp. 248.262.262,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 120.142.100,- atau (48,39%);
- 39) Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, pagu anggaran Rp. 17.450.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 4.850.000,- atau (27,79%);
- 40) Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, pagu anggaran Rp. 17.450.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 4.850.000,- atau (27,79%);
- 41) Sub. Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan , pagu anggaran Rp. 17.056.100,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 9.181.100,- atau (53,82%);
- 42) Sub. Kegiatan Kerja Sama antara Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehaabilitasi Sosial Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp.152.673.800,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 2.640.000,- atau (0,41%);

• **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

- 43) Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 614.829.400,- dengan capaian realisasi anggaran Rp 96.513.200,- atau (15,69%);
- 44) Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, pagu anggaran Rp. 11.362.977.321,- dengan capaian realisasi anggaran Rp 277.985.400,- atau (2,44%);
- 45) Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, pagu anggaran Rp. 80.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp 2.559.000,- atau (3,19%);

- 46) Sub. Kegiatan Penyediaan Makanan, pagu anggaran Rp. 2.038.100.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp 1.044.020.900,- atau (51,22%);
- 47) Sub. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 72.963.300,- dengan capaian realisasi anggaran Rp 23.178.500,- atau (51,22%);

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2023TW II

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.104.961.165	4.283.294.106	52,85
	Sub. Kegiatan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	209.475.693	189.915.672	90,66
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.132.222	3.741.400	2,88
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.938.477.148	2.260.738.617	45,78
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.950.000	19.744.800	49,42
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	149.058.809	38.935.025	26,12
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.089.000	52.409.000	96,89
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	29.803.900	99,35
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.588.400	15.555.300	60,79
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.746.500	38.799.350	48,05
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.186.999	18.305.700	45,55
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.287.300	1.000.000	3,95
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.968.500	20.054.800	50,18
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.174.500	57.025.000	36,28
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	875.070.000	742.050.000	84,80
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.268.100	195.592.000	52,97
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.551.044	450.216.970	99,06

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.995.200	1.700.000	85,20
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.515.000	51.894.040	42,71
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.450.000	13.715.000	32,31
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.906.750	45.197.313	26,34
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.070.000	36.900.219	52,69
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.860.016.350	1.507.010.700	
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	65.582.400	50.000.000	76,23
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.047.891.000	437.017.800	41,70
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	119.139.400	24.883.400	20,89
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	222.948.000	217.008.000	97,34
26	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.404.455.550	778.101.500	55,40
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	26.813.150	18.990.850	70,83
27	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	26.813.150	18.990.850	70,83
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.286.327.192	658.683.292	51,21
28	Penyediaan Permakanan	219.200.000	174.097.360	79,42
29	Penyediaan Sandang	176.555.800	170.582.832	96,62
30	Penyediaan Alat Bantu	120.160.400	115.856.900	96,42
31	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17.797.215	7.550.000	42,42
32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	133.334.200	0	0,00
33	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	38.116.900	17.560.000	46,07
34	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.777.700	3.259.200	33,33
35	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	99.598.914	15.250.000	15,31
36	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	36.343.901	17.713.800	48,74
37	Pemberian Layanan Kedaruratan	248.262.262	120.142.100	48,39
38	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.450.000	4.850.000	27,79
39	Pemberian Layanan Rujukan	17.056.100	9.181.100	53,83
40	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	152.673.800	2.640.000	1,73
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.057.806.721	377.057.600	3,13
41	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	614.829.400	96.513.200	15,70
42	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.362.977.321	277.985.400	2,45
43	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	80.000.000	2.559.000	3,20

SUMBER DATA: Dinas Sosial 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.038.100.000	1.044.020.900	51,23
	Penyediaan Makanan	2.038.100.000	1.044.020.900	51,23
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	72.963.300	23.178.500	31,77
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	72.963.300	23.178.500	31,77

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan Dinas Sosial Pada **Tahun 2023TW II**, ada 6 (enam) Program yang mendekati pemenuhan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
- a) **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dari total anggaran sebesar Rp. 8.104.961.165, dengan capaian realisasi anggaran Rp. 4.283.294.106,- atau sebesar (52,85%);
 - b) **Program Pemberdayaan Sosial** dari total anggaran sebesar Rp. 2.860.016.350 dengan capaian realisasi anggaran Rp. 1.507.010.700,- atau sebesar (52,69%);
 - c) **Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** dari total anggaran sebesar Rp. 26.813.150 dengan capaian realisasi anggaran Rp. 18.990.850 atau sebesar (70,83%);
 - d) **Program Rehabilitasi Sosial** dari total anggaran sebesar Rp. 1.286.327.192 dengan capaian realisasi anggaran Rp. 658.683.292 atau sebesar (51,21%);
 - e) **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dari total anggaran sebesar Rp. 1.286.327.192 dengan capaian ralisasi anggaran Rp. 658.683.292 atau sebesar (51,21%);
 - f) **Program Penanganan Bencana** dari total anggaran sebesar Rp. 2.038.100.000 dengan capaian realisasi anggaran Rp. 1.044.020.900 atau sebesar (51,23%);
 - g) **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** dari total anggaran Rp. 72.963.300 dengan capaian realisasi anggaran Rp. 23.178.500 atau sebesar (31,77%).

Dari 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Garut Pada Tahun 2023(TW II), ada 3 (Tiga) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan pagu anggaran Rp. 84.089.000,- capaian realisasi anggaran Rp. 82.212.900 atau (97,77%);
- 2) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, pagu anggaran Rp. 1.698.889.144,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 1.387.858.970 atau (81,69%);
- 3) **Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota**, pagu anggaran Rp. 26.813.150,- dengan capaian realisasi anggaran Rp18.990.850,- atau (70,83%);

Dari 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial pada **Tahun 2023TW II**, ada 11 (Sebelas) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 209.475.693,- capaian realisasi anggaran Rp. 189.915.672 atau (90,66%);
- 2) Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, pagu anggaran Rp. 30.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 29.803.900 (99,34%);
- 3) Sub. Kegiatan Sub. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu anggaran Rp. 875.070.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 742.050.000,- atau (84,79%);
- 4) Sub. Kegiatan Sub. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran Rp. 454.551.044,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 450.216.970,- atau (99,04%);
- 5) Sub. Kegiatan Sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.995.200,- dengan capaian realisasi anggaran, pagu anggaran Rp. 1.700.000,- atau (85,20%);
- 6) Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 65.582.400,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 50.000.000,- atau (76,23%);

- 7) Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota, pagu anggaran Rp. 222.948.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 217.008.000,- atau (97,33%);
- 8) Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, pagu anggaran Rp. 26.813.150,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 18.990.850,- atau (70,82%);
- 9) Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan, pagu anggaran Rp. 219.200.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 174.097.360,- atau (79,42%);
- 10) Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang, pagu anggaran Rp. 176.555.800,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 170.582.832,- atau (96,61%);
- 11) Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, pagu anggaran Rp. 120.160.400,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 115.856.900,- atau (96,41%);

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada
Dinas Sosial Kabupaten Garut
Tahun 2023(TW II)

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
1.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	209.475.693	189.915.672	90,66
2.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.089.000	52.409.000	96,89
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	29.803.900	99,35

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	875.070.000	742.050.000	84,80
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.551.044	450.216.970	99,05
4.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.995.200	1.700.000	85,20
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
5.	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota			
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	65.582.400	50.000.000	76,24
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	222.948.000	217.008.000	97,34
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
6	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usa terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
	Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	219.200.000	174.097.360	51,21
	Penyediaan Sandang	176.555.800	170.582.832	79,42
	Penyediaan Alat Bantu	120.160.400	115.856.900	96,62

Sumber : Pengolahan data dan LRA 2023 sampai dengan TW 2

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Tahun 2023TW II, di Dinas Sosial tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) Adanya peraturan PMK 212 berkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan pada SKPD ;
- 2) Adanya Rotasi dan Mutasi pejabat eselon III/b pada SKPD Dinas Ssosial;

- 3) Adanya mutasi pegawai dan Purna bakti ASN sehingga ada perubahan PPK dan BPP pada SKPD Dinas sosial;
 - 4) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya;
 - 5) Adanya perubahan anggaran dari parsial 1 sampai dengan parsial 3 yang dimana parsial 3 (tiga) ada pendambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT (CUKAI ROKO);
 - 6) Adanya pergeseran anggaran yang pelaksanaan perencanaannya pada bulan Juli s/d Oktober 2023 saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- b. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana pada DPA dan Anggaran Kas.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Pada Tahun 2023(TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kabupaten Garut.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Sosial.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :
- 1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Rumah Singgah pada Dinas Sosial;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan ;

- 3) Dinas Sosial memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif;
- 4) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens antara SKPD terkait dalam penanganan/penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut;

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama SKPD : Dinas Sosial

Lembar : 1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Dinas sosial yang transparan dan akuntabel	83,00 %	N A	81,35	81,35	100	83,00 %	162,70	50,67
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	82,00 %	100%	81,35	81,35	100	82,00 %	162,70	50,67
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1Dok	100	1 Dok	3dok	100

Sumber : Pengolahan Data Dinas Sosial 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	1DOK	2 Laporan	2 Laporan	0	2 Laporan	3	100
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN dan laporan administrasi keuangan dinas	83%	100%	83%	88	100	83%	271,45	36,90
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN dan PPPK	51 Orang	100	51 Orang	51 Orang	100	51 Orang	202	24,75
1	06	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporannhasil koordinasipanyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 Laporan	60,00	3 Laporan	3 Laporan	60,00	3 Laporan	66	4,54
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milikn Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	82,50 %	100	82,50 %	80	100	82,50 %	262,50	31,42
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik SKPD	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	102	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN	82 %	100%	82 %	0	0	82 %	164	100
1	06	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	3 Paket	116	3 Paket	3 Paket	0	3 Paket	118	11,80
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak	375 Orang		375 Orang	375 Orang		375 Orang	119	31,73
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi	82,42 %	161,42	82,42 %	57,57	100	82,42 %	295,56	27,74

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	57	1 Paket	1 Paket	100	12	57	46
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	100	3 paket	3 paket	100	25	100	4,25
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan ysng disediakan	3 Paket	40	3 Paket	3 Paket	100	11	40	100
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	38	1 dokumen	1 dokumen	100	13	38	100
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1762	1 laporan	1 laporan	100	462	1762	100
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	36	48 laporan	48 laporan	100	12	36	100
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas ASN pada bidang Sosial	82,50 %	100%	82,50 %	0	0	82,00	182	44,50
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jaabatan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0	2	6	33,33
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31 Unit	11 Unit	31 Unit	31 Unit	100	13	55	56,36
1	06	01	2.07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau banbunan lainnya	7 unit	0	7 unit	7 unit	100	0	7	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	80	100%	80	80	100	83,00	263	30,41
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	306 Bh	500 Bh	306 Bh	306 Bh	100	236	1042	29,36
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12	36	33,33
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 Bh	0	5 Bh	5 Bh	100	62	67	7,46
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12	36	33,33
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	80	100%	80	80	100	82.45	262,45	30,48
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	24 Unit	20 Unit	24 Unit	24 Unit	100	24	68	35,29
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	4 Unit	0	4 Unit	4 Unit	100	2	10	40,00
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100	0	1	100
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	24.26 %	29,89	70	70	100	30,31	100	30,31

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi pekerja sosial masyarakat dalam pemberdayaan sosial.	70	65	70	70	100	30,31	100	30,31
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	50	80 PSM	50	50	100	55	185	27,02
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	42 Org	42 Org	42 Org	42 Org	100	42	126	33,33
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) & Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga) dan Jumlah keperintisan kemerdekaan dapat terpenuhinya kebutuhan dasar janda PKRI.	13 Org 40 Org	90 Org	13 Org 40 Org	13 Org 40 Org	100	13 80	196	27,04
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KT, LKS yang mengikuti peningkatan kemampuan potesni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. JumlahKT, LKS yang mengikuti peningkatan kemampuan potesni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	50LKS	30 KT,	50 LKS	50 LKS	100	50 25	130	38,46
1	06	02	2.03	06	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat miskin yang dilayanan melalui (LAPAD RUHAMA) dan LK3	442 Ds/ Kel.	442 Ds/ Kel.	442 Ds/ Kel.	442 Ds/ Kel.	100	442	2652	16,66

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Penanganan /pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan	70	68	70	70	100	30,25	100	41,60
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerahn Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Meningkatnya warga negara migran tindak kekerana yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa /Keluarahan asal	70	68	70	70	100	30.25	168,25	41,60
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran yang terfasilitasi untuk dipulangkan ke Desa /Keluarah asal, serta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan.	70 Org	20 Org	70 Org	70 Org	100	47	137	51,09
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	66,08	30,11	100	30,11	30,11	30.11	48,85	61,63
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	66,08	32,06	100	32,06	23,06	32.06	55,32	57,95
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	240	100	240	60	31,66	240	400	60,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	240 Org	100	240 Org	36	15,00	240 Org	376	100
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlaah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	105 Orang	100	105 Orang	23	21,90	105 Orang	228	46,05
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reynufukasi	75 Orang	100	75 Orang	9	12,00	75 Orang	184	40,76
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbingasn sosial	64 Orang	100	64 Orang	0	0	64 Orang	164	39,02
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbingasn sosial .bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	45 Org	100	45 Org	0	0	45 Org	145	31,03
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi NIK, Surat Nikah, dan KIA	73 Orang	100	73 Orang	12	16,43	73 Orang	185	39,45
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan, data dan pengaduan	42 Orang.	100	42 Orang.	32	76,19	42 Orang.	174	24,13
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengadua dalam pemenuhan kebutuhan dasar	42 Orang	100	42 Orang	15	79,00	42 Orang	157	26,75
1	06	04	2.01	08	Pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan	64 Orang	100	64 Orang	9	14,06	64 Orang	173	36,99

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan data dan pengadua dalam pemenuhan kebutuhan dasar	42 Org	100	42 Org	15	35,71	42 Org	157	26,75
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlaah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	42 Orang	100	42 Orang	19	45,23	42 Orang	161	26,08
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya	48,82	0	48,82	48,82	100	66,08	114,9	42,48
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokume	2 dokumen	4	50
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya PPKS yangb mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya	47,54	58,54	47,54	47,54	75,00	47,54	147,51	30,87
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan verfali data DTKS dan BANSOS	47,54	52,43	47,54	47,54	75,00	47,54	147,51	30,87
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengolahan data FM yang valid pada dokumen data .	325	1 Dok	325	325	75,78	325	650	50
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi pendampingan BPNT bagi KPM Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi pendampingan PKH	560	379 Org 50 Org	560	560	77,89	560	1549	36,15
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang dilatih bidang perekonomian bagi FM pesisir/perkotaan dan pedesaan	48	100 Org	48	48	75,68	48	196	24,48

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 202)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial	100%	100	100	100	100	100	300	33,33
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bantuan bagi korban bencana alam dan sosial yang Mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasarnya.	100%	100%	100	100	100	100	300	33,33
1	06	06	2.0	01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan.	3000	3000	3000	3000	100	2300	7600	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	75,50 %	75 %	75,50 %	75,50 %	100	75,50 %	226	33,40
1	06	07	2.01		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya pemeliharaan makam pahlawan nasional Kab Garut	75,50%	75%	75,50%	75,50%	100	75,50%	75	33,40
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara	1700	1 paket	1700	1700	100	1700	3401	49,98

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 48,75 % untuk target kinerja dan 48,75 % untuk target anggaran.

Tabel 2.4
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Garut
Periode Pelaksanaan Tahun 2023TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 202)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/ Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
I	Meningkatnya dukungan tata Kelola program dan kegiatan dilingkup dinas sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial yang transparan dan akuntabel.	83,35	12.436.385.020	97,31	1.231.581.142	82.45	2.204.844.890	24,88	78,04			31,58	3.572.841.964	64,45	120.748.780	89,20	11.093.572.541	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,45	458.995.350	97,31	40.692.800	82.45	222.412.220	24,88	78,04			31,58	90.625.980	64,45	120.748.780	35,31	537.721.415	
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun.	3	115.663.900	94,62	31.519.700	3 Dok	189.915.672	90,66	90,66			58,15	67.259.980	76,38	98.779.680	85,40	211.932.532	
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan yang tersusun (LKPJ, LAKIP)	2	254.753.400	100	9.173.100	1 Dok	16.396.000	24,88	78,04			5,02	12.796.000	52,51	21.969.100	8,6	244.633.795	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kas i)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja (IKM, LPPD) Tersedianya SOP dan SP SKPD	2 lap	88.578.050	0,00	0,00	3 Dok	144.630.000	0,00	4,91			4,91	10.570.000	4,91	10.570.000	11,93	81.155.088	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN dan laporan administrasi keuangan dinas	84,00	7.525.244.510	100	40.692.800	83%	1.499.143.095	15,64	54,97			37,53	2.824.633.069	64,78	7.139.033.313	88,99	7.445.907.4 13	
2.4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Dinsos	12 bln	7.452.039.510	93,47	4.274.087.344	1 Th	1.489.160.595	14,72	58,95			37,62	2.804.093.069	65,54	7.078.180.413	94,98	7.373.583.05 7	
2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	12 bln	73.205.000	100	40.312.900	1 Lap	9.982.500	16,57	51,00			28,05	20.540.000	64,02	60.852.900	83,00	72.324.356	
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	82,50	180.724.880	0,00	0,00	80%	37.245.477	0,00	49,00			98,19	36.575.000	100	21.468.300	11,88	165.511.061	
3.6		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bln	180.724.880	0,00	0,00	12 Bl	37.245.477	0,00	49,00			100	21.468.300	100	21.468.300	11,88	165.511.061	
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN	82,50	177.156.100		0,00	82%	21.468.300	0,00	100			12,11	21.468.300	100	21.468.300	12,12	162.537.204	
4.6		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	1 paket	177.156.100	0,00	0,00	2 Paket	21.468.300	0,00	100			100	21.468.300	100	21.468.300	12,12	162.537.204	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/ Kas i)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi	83,00	2.130.265.500	70,65	758.971.940	82%	93.260.148	18,98	48,42			48,43	213.780.368	69,00	928.685.808	39,90	2.063.246.208	
5.7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	1	417.268.500	100	53.251.600	1 Paket	11.818.998	23,78	74,00			74,00	30.761.398	69,50	84.012.998	20,13	396.543.969	
5.8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang tersedia	1	768.652.500	99,39	437.852.100	1 Paket	21.000.000	25,81	69,00			69,00	53.124.070	66,95	490.976.170	63,87	756.618.786	
5.9		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.10		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	1	219.615.000	95,17	73.413.240	1 Paket	19.691.150	29,85	61,00			61,00	9.908.400	62,84	83.321.640	37,94	213.826.498	
5.11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	1	51.243.500	0,00	0,00	1 Paket	6.750.000	14,50	29,00			29,00	10.845.000	29,00	10.845.000	21,16	48.822.203	
5.12		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan makan tamu Jumlah makan minum rapat dinas	1	16.1051.000	99,98	140.805.000	1 Paket	7.500.000	15,97	52,00			52,00	10.845.000	62,99	151.650.000	94,16	159.340.652	
5.13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan ke dalam daerah	12 Bln	512.435.000	100	53.650.000	1 Paket	26.500.000	22,96	54,00			54,00	54.230.000	63,50	107.880.000	21,05	488.094.100	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas ASN pada bidang Sosial	82,70	253.929.880	0,00	0,00	81%	194.570.000	0,00	93,00			71,37	181.253.300	93,15	181.253.300	48,21	545.647.477	
6.14		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli (roda dua) Jumlah kendaraan dinas oprasional roda empat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.15		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan msin lainnya yang menunjang kinerja ASN	51	375.951.598	0,00	0,00	13 Unit	194.570.000	0,00	93,00			93,15	181.253.300	93,15	181.253.300	48,21	177.493.638	
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	83,35	1.051.223.800	65,08	265.004.589	82,45	96.465.650	14,97	45,50			14,66	154.134.747	60,79	419.139.336	30,97	408.627.098	
7.16		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ersedianya jasa surat menyurat	1	14.641.000	0,00	0,00	236	600.000	30,43	44,00			44,00	1.140.000	44,00	1.140.000	7,79	993.590	
7.17		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	1	423.124.900	64,62	61.933.389	12 bln	39.000.000	4,58	32,00			32,00	38.017.997	48,31	99.951.386	23,63	95.720.137	
7.18		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	1	204.974.000	98,55	36.150.000	62	11.100.000	19,53	57,00			57,00	23.817.000	77,78	59.967.000	29,26	57.917.260	
7.19		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	1	408.483.900	97,17	166.921.200	12 bln	45.765.650	5,36	49,00			49,00	91.159.750	73,08	258.080.950	63,18	253.996.111	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab (Bidang/ Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	82,25	658.845.000	79,08	126.219.013	81.35	40.280.000	13,86	29,00			7,64	50.371.200	54,04	179.590.213	27,26	173.001.763	
8.20		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayar pajak	24	146.410.000	60,42	16.465.800	24 unit	12.500.000	0,00	15,00			15,00	7.451.200	37,71	23.917.000	16,34	22.452.900	
8.21		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang terpelihara	24	512.435.000	97,74	109.753.213	2 unit	27.780.000	13,86	43,00			43,00	42.920.000	70,37	152.673.213	29,79	147.548.863	
II	Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat ;	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	50.43	5.417.170.000	98,00	5.211.675.456	48,85	587.556.000	8,48	34,60			20,62	1.117.208.150	86,36	6.330.883.606	116,86	6.276.711.906	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangka t Daerah Penangu ng Jawab (Bidang/ Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
9		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Meningkatnya pengembangan potensi pekerja sosial masyarakat dalam pemberdayaan sosial	50.43	5.417.170.000	98,00	5.211.675.456	48,85	587.556.000	8,48	34,60			50,02	1.117.208.150	86,36	6.330.883.606	116,867	6.276.711.906	
9.22		Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kbupaten/kota	Jumlah PSM yang mengikutipengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	797	805.255.000	0,00	0,00	105	6.627.100	0,00	12,00			11,81	10.327.100	11,81	10.327.100	1,28	2.274.550	
9.23		Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	42	1.171.280.000	0,00	0,00	42 Org	196.275.000	18,22	63,00			63,24	455.550.000	63,24	455.550.000	38,89	443.837.200	
9.24		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlqh keperintisan kemerdekaan yang dapat terpenuhinya kebutuhan dasar (Janda PKRI) & PSKS dalam pemberdayaan WRSE.	240	878.460.000	95,11	3.411.001.556	13 Org 80 Org	90.153.900	5,29	24,00			23,73	35.681.600	59,42	3.446.683.156	392,36	3.437.898.556	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	106	366.025.000	99,17	406.949.900	50 KT 25 LKS	2.800.000	2,79	24,00			23,53	23.635.000	61,35	432.584.900	118,18	428.924.650	
9.25		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang dilayani melalui (LAPAD RUHAMA)dan LK3	442	2.196.150.000	99,74	1.393.724.000	442	291.700.000	16,12	50,00			50,42	592.014.450	75,08	1.985.738.450	90,42	1.963.776.950	

No		Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
1		2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
III			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya pengembangan potensi pekerja sosial masyarakat dalam pemberdayaan sosial	99,26	323.566.100	99,28	127.101900	47,54	57.702.000	4,43	16,00			16,27	23.879.000	57,77	150.980.900	46,66	316.631.778	
10			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasih di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Meningkatnya Warga Negara Migran Tindak Kekerasan yang Mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa/Kelurahan	99,26	323.566.100	99,28	127.101900	47,54	57.702.000	4,43	16,00			16,27	23.879.000	57,77	150.980.900	46,66	316.631.778	
10.26			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	59	323.566.100	99,28	127.101.900	47Org	57.702.000	4,43	16,00			16,27	23.879.000	57,77	150.980.900	46,66	316.631.778	
IV			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		50,36	5.213.680.598	99,31	566.141.100	30,11	486.918.000	43,83	52,63			52,70	573.711.378	52,89	1.139.852.478	21,86	1.087.715.672	
11			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.	50,36	5.213.680.598	99,31	566.141.100	32,06	486.918.000	43,83	52,63			52,70	573.711.378	52,89	1.139.852.478	21,86	1.087.715.672	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
11.27		Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	240	648.202.457	99,31	566.141.100	240 Org	7.897.700	2,32	95,00			95,23	167.273.508	97,32	733.414.608	113,15	726.932.583	
11.28		Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar	240	557.785.498	0,00	0,00	240 Org	91.061.700	4,40	92,00			92,49	100.153.640	92,49	100.153.640	17,96	94.575.785	
11.29		Penyediaan alat bantu	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	116	416.750.209	0,00	0,00	45 Org	92.390.000	1,74	95,00			95,46	95.463.930	95,46	95.463.930	22,91	91.296.428	
11.30		Pembereian layanan reunifikasi keluarga	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reunifikasi	82	648.202.457	0,00	0,00	60 Org	4.842.700	4,33	44,00			43,73	8.085.400	43,73	8.085.400	1,25	1.603.375	
11.31		Pemberian bimbingan fisik, mental, sepiritual,dan sosial	Jumlah PPKS yang mendaptkan Bimbingan fiskik, mental, spiritual dan sosial	70	648.202.457	0,00	0,00	50 Org	186.763.800	0,77	1,00			0,8	1.540.000	0,8	1.540.000	0,24	-4.942.025	
11.32		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyndang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengis dan masyarakt	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan sosial bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	73	234.256.000	0,00	0,00	120 Org	21.232.000	4,30	19,00			19,35	15.300.000	19,35	15.300.000	6,53	12.957.440	
11.33		Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akte kelahiran surat nikah, dan kartu identitas anak	Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi NIK, Surat Nikah, dan KIA	81	513.459.870	0,00	0,00	60 Org	5.400.000	5,27	21,00			21,01	3.986.300	21,01	3.986.300	0,78	- 1.148.299	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab (Bidang/ Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
11.34		Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan, data dan pengaduan	42 kec	376.273.700	0,00	0,00	42 kec	13.975.500	0,00	26,00			26,16	30.000.000	26,16	30.000.000	7,97	26.237.263	
11.35		Pemberian layanan kedarurata	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan	42 Kec	584.907.950	0,00	0,00	42 KEC	55.119.700	6,65	60,00			59,50	133.289.700	59,50	133.289.700	22,79	127.440.621	
11.36		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	38 Org	366.025.000	0,00	0,00	38 Org	3.134.900	8,43	59,00			58,86	6.868.900	58,86	6.868.900	1,88	3.208.650	
11.37		Pemberian layanan rujukan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rujukan	59 Org	219.615.000	0,00	0,00	59 Org	5.100.000	5,62	67,00			67,14	11.750.000	67,14	11.750.000	5,35	9.553.850	
V		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	28,20	5.343.965.000	96,96	873.009.900	17,10	270.350.000	1,86	49,39			4,92	385.712.219	28,16	398.547.719	9143,76	2.479.469.418	
12		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten /kota	Meningkatnya pelaksanaan verifali data DTKS dan BANSOS	51,15	5.343.965.000	96,96	873.009.900	33,33	270.350.000	1,86	49,39			4,92	385.712.219	28,16	398.547.719	9143,76	2.479.469.418	
12.38		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah	Jumlah pengelolaan data FM cakupan daerah kabupaten/kota	1 dok	2.122.945.000	96,96	873.009.900	1 dok	45.688.000	1,76	2,17			29,85	223.071.119	29,85	223.071.119	10,51	1.920.906.498	
12.39		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi pendampingan BPNT bagi KPM	50 Org	2.049.740.000	0,00	0,00	50 Org	219.392.000	1,91	73,00			2,16	149.805.600	2,16	149.805.600	7,31	1.769.280.921	
			Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan fsilitasi pendampingan PKH	502 Org	1.171.280.000	0,00	0,00	502 Org		1,91	73,00			73,00	12.835.500	73,00	12.835.500	0,63	1.223.552.094	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. (%)		Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab (Bidang/ Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
12.40		Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang dilatih bidang perekonomian bagi fm pesisir/perkotaan dan perdesaan	100 org	1.171.280.000	0,00	0,00	100	5.270.000	0,00	7,65			7,65	12.835.500	7,65	12.835.500	9125,32	12.834.093	
VI		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam daan sosial	100%	2.411.372.700	99,96	1.192.322.380	100%	396.080.700	2,82	85,33			44,47	1.072.466,012	73,35	1.972.076.392	60,71	863.743.315	
13		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Tersedianya bahan bantuan bagi korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	1.459.707.700	99,96	352.322.380	2300 jiwa	153.272.150	2,82	85,33			36,03	526.018.012	67,99	878.340.392	60,71	863.743.315	
13.41		Penyediaan makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan	5051 jiwa	1.459.707.700	99,96	352.322.380	2300 jiwa	153.272.150	2,82	85,33			36,03	526.018.012	67,99	878.340.392	60,71	863.743.315	
14		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten/kota	Meningkatnya ds/kel. yang mengikuti pemberdayaan terhadap kesiap siagaan bencana	45,12	951.665.000	100	840.000.000	29,28	242.808.550	15,46	54,78			57,42	546.448.000	78,71	1.093.736.000	114,9	1.084.219.350	
14.42		Koordinasi, sosial dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruan siaga bencana yang dapat meningkatkan dalam penanganan bencana alam dan sosial	91	951.665.000	100	840.000.000	57 Org	242.808.550	15,46	54,78			57,42	546.448.000	78,71	1.093.736.000	114,9	1.084.219.350	
			Jumlah orang terlantar yang dapat dibantu	100 Org				100												

	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100		15
VII		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	75,50	732.050.000	0,00	0,00	75,50	11.500.000	22,88	53,88			7,50	26.937.650	7,50	26.937.650	7,51	23.350.605	
15		Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Tersedianya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kab. Garut	75%	732.050.000	0,00	0,00	75,50	11.500.000	22,88	53,88			7,50	26.937.650	7,50	26.937.650	7,51	23.350.605	
15.43		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara	1 paket	358.704.500	0,00	0,00	1700	11.500.000	22,88	53,88			7,50	26.937.650	7,50	26.937.650	7,51	23.350.605	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
Faktor pendorong pencapaian kinerja :																				
Faktor penghambat :																				
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya :																				
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya :																				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan & Pengelolaan Taman Makam Pahlawan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kabupaten Garut. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial /SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Garut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (Lima) layanan dasar yaitu sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Adapun untuk memenuhi layanan dasar tersebut bidang rehabilitasi sosial mempunyai Program Rehabilitasi Sosial dengan 11 (sebelas) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar panti;
- 2) Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti;
- 3) Penyediaan Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar panti;
- 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar panti;
- 5) Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga;

- 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - 7) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak;
 - 8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - 9) Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - 10) Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga;
 - 11) Pemberian Layanan Rujukan;
 - 12) Penyediaan Permakanan Bagi Masyarakat Korban Bencana
- Selanjutnya, dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam:
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 2.1
Target Pencapaian SPM Bidang
Urusan Sosial Kabupaten Garut
Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Pant	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Masa Tanggap Darurat Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Masa Tanggap Darurat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang sosial di Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran Penerapan SPM
Berdasarkan Sumber Anggaran
Tahun 2022

NO	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	APBD	1.684.557.450,00	1.857.893.250,00	1.857.138.528,00	99.92%
2	APBN	-	-	-	-

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Penerapan SPM
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	%
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis diLuar Panti	54,642,000	54,642,000	54,641,800	100
2	Layanan Pemberian Permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis diLuar Panti	175,650,800	175,650,800	175,591,208	99.97
3	Layanan Pemberian Sandang	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis diLuar Panti	108,281,800	108,281,800	107,993,640	99.73
4	Layanan Pemberian Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis diLuar Panti	100,000,000	100,000,000	99,593,930	99.59
5	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis diLuar Panti	223,989,900	223,989,900	223,989,700	100

6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	18,972,800	18,972,800	18,972,600	100
7	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	79,062,000	61,062,000	61,062,000	100
8	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	207,854,000	207,854,000	207,853,800	100
9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	18,485,400	18,485,400	18,485,400	100
10	Pemberian Layanan Rujukan	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	17,500,000	17,500,000	17,500,000	100
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	11,669,000	11,669,000	11,668,900	100
12	Penyediaan Permakanan Bagi Masyarakat Korban Bencana	Program Penanganan Bencana, Perlindungan Sosial Korban Bencana	616.449.750	856.035.550	856.035.550	100
Total			1.684.557.450	1.857.893.250	1.857.138.528	99.92

3. Dukungan Personil

Kondisi sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Dukungan Personil
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022**

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH	SATUAN
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut	1	Orang
2	Sekretaris Dinas Sosial	1	Orang
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	Orang
4	Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	Orang
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	Orang
6	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	1	Orang
7	Pekerja Sosial-Ahli Muda	11	Orang
8	Pekerja Sosial-Ahli Pertama	5	Orang
9	Pendamping Rehabilitasi Sosial	2	Orang
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	42	Orang
11	Tim Respon Sosial	5	Orang
12	TAGANA	57	Orang

4. Hasil Capaian

Capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara target di penetapan kinerja dengan realisasi target yang dilaksanakan selama Tahun 2022.

**Tabel 3.5
Hasil Capaian
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	TARGET	OUTPUT REALISASI	HASIL CAPAI (%)	
						OUT PUT	OUTCOME
1	Layanan Datadan Pengaduan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan data dan pengaduan	54.642.000,-	200 orang	200 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pelayanan data dan pengaduan bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan gelandangan serta pengemis di luar panti
2	Layanan Kedaruratan;	Jumlah Penyandang Disabilitas	223.989.900,-	42 orang	42 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pemberian

		Terlantar, LanjutUsia Terlantar, Anak dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan pemberian layanan kedaruratan					layanan kedaruratan bagi Disabilias Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan gelandangan serta pengemis di luar panti
3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, LanjutUsiaTerlantar, AnakTerlantar dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan pemberian permakanan	175.650.800,-	240 orang	240 orang	100 %	Meningkatnya 30.11 % Pelayanan Permakanan bagi Disabilias Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan gelandangan serta pengemis di luar panti
4	Penyediaan Sandang;	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, LanjutUsiaTerlantar, AnakTerlantar dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan pemberian sandang	108.281.800,-	240 orang	240 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pelayanan Pemberian Sandang bagi Disabilias Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan gelandangan serta pengemis di luar panti
5	Penyediaanalat bantu;	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, LanjutUsiaTerlantar, AnakTerlantar dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan pemberian alatbantu	100.000.000,-	45 orang	45 orang	99,59%	Meningkatnya 30.11% Pelayanan Pemberian Alat Bantu bagi Disabilias Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan gelandangan serta pengemis di luar panti
6	Pemberian bimbingan fisik,mental	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,	199.854.000,-	50 orang	50 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pemberian Bimbingan

	spiritual dan sosial;	Lanjut Usia Terlanter, Anak dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter dan Gelandangan serta Pengemis
7	Pemberian bimbingan sosial kepadaKeluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Anak Terlanter, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat;	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Anak dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan pemberian Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	61.062.000,-	120 orang	120 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pemberian Layanan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
8	Fasilitasi pembuatan nomor indukkependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Anak dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan pemberian Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan ,Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	18.972.800,-	60 orang	60 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pemberian Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah danKartu Identitas Anak bagi Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, dan gelandangan serta pengemis di luar panti
9	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Anak Terlanter dan Gelandangan sertaPengemis yang memperoleh layanan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	11.669.000,-	38 orang	38 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak terlanter, Lanju Usia Terlanter, dan Gelandangan pengemis

10	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.485.400,-	60 orang	60 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan serta Pengemis
11	Layanan Rujukan.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan serta Pengemis yang memperoleh layanan Pemberian Layanan Rujukan	17.500.000,-	59 orang	59 orang	100 %	Meningkatnya 30.11% Pemberian Layanan Rujukan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan serta Pengemis
12	Penyediaan Permakanan Bagi Masyarakat Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan.	856.035.550,-	2465 Jiwa	2465 Jiwa	100%	Tersedianya bahan bantuan bagi korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar
Total Anggaran			1.857.893.250				

5. **Kendala, Permasalahan dan Solusi**

5.1. **Kendala dan Permasalahan**

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 antara lain:

- a) Kurangnya Data PMKS yang Akurat pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
- b) Tidak adanya Data Best Penanganan PPKS pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
- c) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ;
- d) Masih perlu peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- e) Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/belum memadai;
- f) Banyak warga yang kehilangan berkas-berkas kartu keluarga dan data administrasi pendukung lainnya akibat bencana sehingga menyulitkan proses pendataan masyarakat yang terkena bencana.
- g) Kondisi bencana yang tak bisa diprediksi sehingga tidak bisa ada hitungan pasti berapa jumlah jiwa yang membutuhkan pertolongan dalam 1 tahun ke depan ;

- h) Anggaran yang tersedia untuk persediaan Bufferstock tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan di lapangan ;
- i) Kondisi Gudang yang belum memadai untuk dijadikan penyimpanan Bufferstock ;
- j) Kondisi Geografis Garut yang menyulitkan untuk mencapai area pelosok.

5.2. Solusi

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 antara lain:

- a. Melakukan Pendataan PPKS yang ditangani oleh Bidang Rehabilitasi Sosial ;
- b. Perlu adanya Database PPKS ;
- c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dalam pencapaian kinerja, monev pelaksanaan program di daerah ;
- d. Peningkatan kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas Sosial terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Garut / Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam meningkatkan fungsi rumah singgah baik sarana, prasarana maupun kemampuan SDM.

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Sosial diKabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Program dan Kegiatan
Pendukung Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/SUB KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATORKINERJA UTAMA	ANGGARAN (Rp)	TARGET
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Data dan Pengaduan di luar panti Sosial	54.642.000,-	200 Orang
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan kedaruratan di luar panti	223.989.900,-	42 Orang
3	Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Persediaan Permakanan di luar panti Sosial	175.650.800,-	240 Orang
4	Penyediaan Sandang	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Persediaan diluar panti	108.281.800,-	240 Orang
5	Penyediaan alat bantu	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Persediaan Alat Bantu di luar panti Sosial	100.000.000,-	45 orang
6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Pelatihan di luar panti Sosial	207.854.000,-	50 Orang
7	Pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Bimbingan Keluarga di luar panti Sosial	61.062.000,-	120 Orang
8	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Fasilitasi Kependudukan keluarga diluar paanti sosial	18.972.800,-	60 Orang
9	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga di laur panti sosial	11.669.000,-	38 Orang

10	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga di luar panti Sosial	18.485.400,-	60 Orang
11	Layanan Rujukan	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan Rujukan Keluarga di luar panti Sosial	17.500.000,-	59 Orang
12	Penyediaan Makanan Bagi Masyarakat Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial	856.035.550	2465 Jiwa
	TOTAL			1.857.893.250	

Datab: Dinas Sosial Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan millenium(*millenium development goals*).

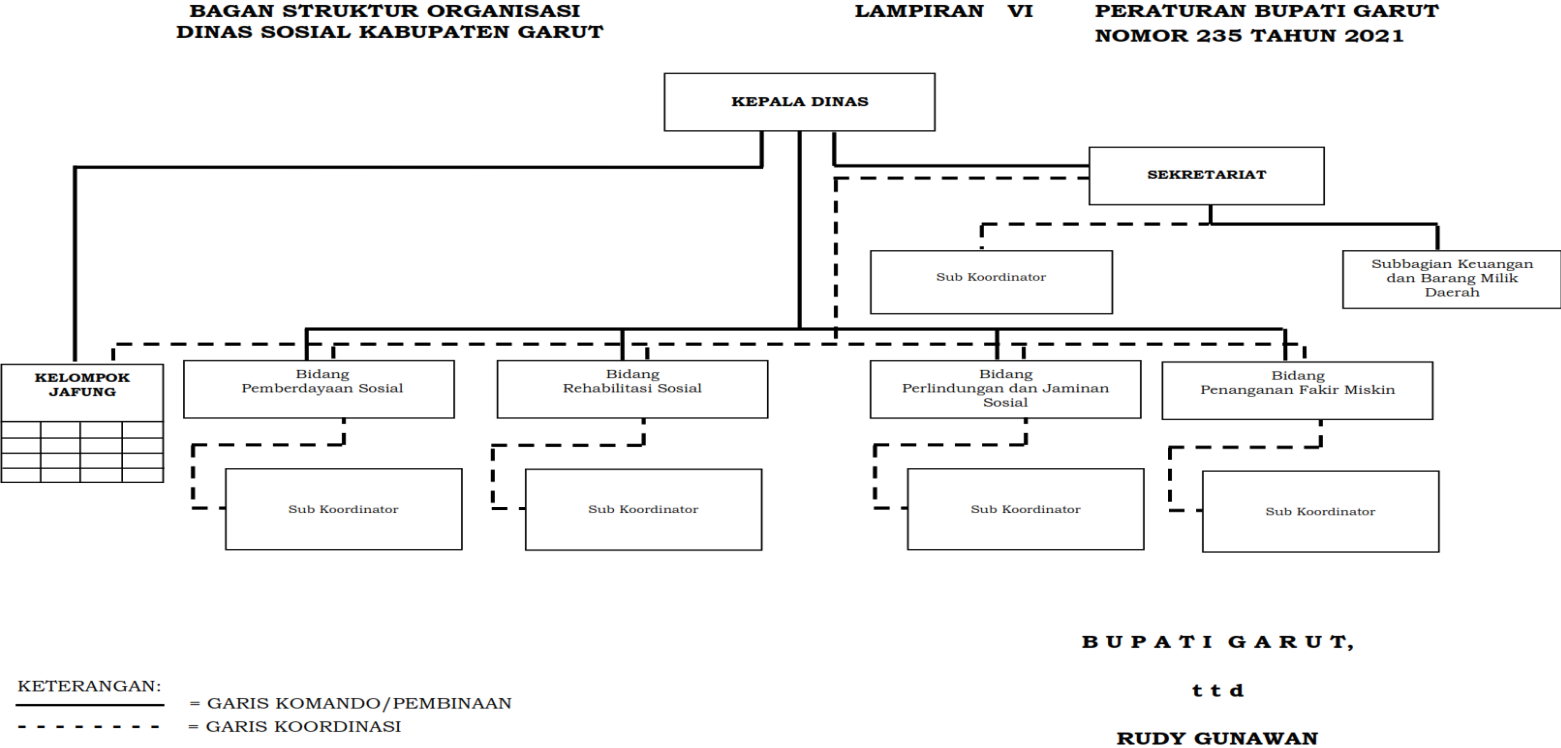
Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi kabupaten/kotayang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal(SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Garut perlu terus dilakukan suatu terobosan, sehingga dapatmenerapkan dan mencapai SPM agar pelayanan yang sangat mendasar dapatdiakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan memperoleh kualitas pelayanan dasar yang sama secara minimal.

Demikian Laporan Setandar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2022 ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.

Gambar 2.1
Struktur organisasi Dinas Sos Kab. Garut



Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.5
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SKPD/Dinas Sosial
 Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			85	85	86	86	87,30	87,30	86	87	
2	Nilai Standar Pelayanan Minimum	100										
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100		100	100	100	100	78,98	76,02	100	100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100		100	100	100	100	80,00	73,68	100	100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100		100	100	100	100	80,00	76,21	100	100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	100		100	100	100	100	77,50	71,42	100	100	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosia	100		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP DINAS SOSIAL			B	B	B	B	B	A	A	A	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan/SKPD, 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:gambaran permasalahan yang terjadi, isu bidang Sosial, yaitu :

1. Tingginya jumlah penduduk miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Belum Terintegrasinya Penanganan Penduduk Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Cakupan Atau Jangkauan Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial yang Dibagi Ke Dalam Tiga Pilar Intervensi, Yaitu : Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Dan Penanganan Bencana ;
4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Belum Optimal;
5. Jangkauan, Mutu Dan Akses Pelayanan Sosial Dasar Masih Kurang;
6. Rendahnya Aksesibilitas Sarana Dan Prasarana Bagi Lansia Dan Disabilitas, Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam Dan Dampak Sosialnya, Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Sosial bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik ;
2. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi) Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sisuak (PPKS) bidang Sosial;
3. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan penduduk menurun, pada akhirnya akan menyebabkan tingkat pendapatan yang diperoleh juga rendah, Gambaran tingkat kualitas sumber daya

manusia dapat diketahui melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

4. Belum Terintegrasinya Penanganan Penduduk Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut dalam pelaksanaan masih dilakukan oleh masing-masing SKPD tidak secara terintegrasi penanganan penduduk miskin, walaupun dalam RPJMD pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terintegrasi antar SKPD dalam penanganan penduduk miskin di Kabupaten Garut ;
5. Jangkauan, Mutu Dan Akses Pelayanan Sosial Dasar Masih Kurang, Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang dan belum optimal peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam memberdayakan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang belum efektif;

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Sumber Daya Manusia yang tersedia dirasakan belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada sudah mencukup untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencanaan masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang berkaitan dengan pelayanan bidang sosial (pendidikan kesejahteraan sosial) . Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan/SKPD berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah SKPD Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran perubahan Tahun 2023 yang diusulkan SKPD Dinas Sosial sebesar Rp. 26.249.959.278 ,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan SKPD Dinas Sosial diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 SKPD Dinas Sosial mengusulkan (Tujuh) Program dengan (Empat Belas) Kegiatan dan (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada SKPD Dinas Sosial mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD											
Kab. Garut Tahun Anggaran 2023																					
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023																					
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Uraian	Belanja Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					25.349.722.138	1.782.586.844	0	0	27.132.308.982	24.724.913.534	1.722.074.344	0	0	26.446.987.878	(685.321.104)	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.777.675.405	1.668.247.044	0	0	8.445.922.449	6.445.840.221	1.659.120.944	0	0	8.104.961.165	(340.961.284)	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					428.676.115	0	0	0	428.676.115	339.607.915	0	0	0	339.607.915	(89.068.200)	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		298.543.893	0	0	0	298.543.893	209.475.693	0	0	0	209.475.693	(89.068.200)		
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		130.132.222	0	0	0	130.132.222	130.132.222	0	0	0	130.132.222	0		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.221.194.132	0	0	0	5.221.194.132	4.978.427.148	0	0	0	4.978.427.148	(242.766.984)	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		5.181.244.132	0	0	0	5.181.244.132	4.938.477.148	0	0	0	4.938.477.148	(242.766.984)		
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		39.950.000	0	0	0	39.950.000	39.950.000	0	0	0	39.950.000	0		
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					149.058.809	0	0	0	149.058.809	149.058.809	0	0	0	149.058.809	0	
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		149.058.809	0	0	0	149.058.809	149.058.809	0	0	0	149.058.809	0		
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					84.089.000	0	0	0	84.089.000	84.089.000	0	0	0	84.089.000	0	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		54.089.000	0	0	0	54.089.000	54.089.000	0	0	0	54.089.000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				348.040.399	20.911.800	0	0	368.952.199	348.040.399	20.911.800	0	0	368.952.199	0	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		25.588.400	0	0	0	25.588.400	25.588.400	0	0	0	25.588.400	0	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		80.746.500	0	0	0	80.746.500	80.746.500	0	0	0	80.746.500	0	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		40.186.999	0	0	0	40.186.999	40.186.999	0	0	0	40.186.999	0	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		4.375.500	20.911.800	0	0	25.287.300	4.375.500	20.911.800	0	0	25.287.300	0	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		39.968.500	0	0	0	39.968.500	39.968.500	0	0	0	39.968.500	0	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		157.174.500	0	0	0	157.174.500	157.174.500	0	0	0	157.174.500	0	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.680.000	1.647.335.244	0	0	1.708.015.244	60.680.000	1.638.209.144	0	0	1.698.889.144	(9.126.100)	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		4.800.000	870.270.000	0	0	875.070.000	4.800.000	870.270.000	0	0	875.070.000	0	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		42.080.000	336.314.200	0	0	378.394.200	42.080.000	327.188.100	0	0	369.268.100	(9.126.100)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kejatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		13.800.000	440.751.044	0	0	454.551.044	13.800.000	440.751.044	0	0	454.551.044	0		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				345.866.950	0	0	0	345.866.950	345.866.950	0	0	0	345.866.950	0		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1.995.200	0	0	0	1.995.200	1.995.200	0	0	0	1.995.200	0		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		121.515.000	0	0	0	121.515.000	121.515.000	0	0	0	121.515.000	0		
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		42.450.000	0	0	0	42.450.000	42.450.000	0	0	0	42.450.000	0		
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		179.906.750	0	0	0	179.906.750	179.906.750	0	0	0	179.906.750	0		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.070.000	0	0	0	140.070.000	140.070.000	0	0	0	140.070.000	0		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		140.070.000	0	0	0	140.070.000	140.070.000	0	0	0	140.070.000	0		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2.902.351.800	0	0	0	2.902.351.800	2.860.016.350	0	0	0	2.860.016.350	(42.335.450)		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				2.902.351.800	0	0	0	2.902.351.800	2.860.016.350	0	0	0	2.860.016.350	(42.335.450)		
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		68.965.400	0	0	0	68.965.400	65.582.400	0	0	0	65.582.400	(3.383.000)		
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1.050.591.800	0	0	0	1.050.591.800	1.047.891.000	0	0	0	1.047.891.000	(2.700.800)		
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		119.139.400	0	0	0	119.139.400	119.139.400	0	0	0	119.139.400	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
Unsur	Belang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		231.550.000	0	0	0	231.550.000	222.948.000	0	0	0	222.948.000	(8.602.000)		
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1.432.105.200	0	0	0	1.432.105.200	1.404.455.550	0	0	0	1.404.455.550	(27.649.650)		
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				109.200.000	0	0	0	109.200.000	26.813.150	0	0	0	26.813.150	(82.386.850)		
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				109.200.000	0	0	0	109.200.000	26.813.150	0	0	0	26.813.150	(82.386.850)		
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		109.200.000	0	0	0	109.200.000	26.813.150	0	0	0	26.813.150	(82.386.850)		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.302.947.312	114.339.800	0	0	1.417.287.112	1.223.373.792	62.953.400	0	0	1.286.327.192	(130.959.920)		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.150.273.512	114.339.800	0	0	1.264.613.312	1.070.699.992	62.953.400	0	0	1.133.653.392	(130.959.920)		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		219.200.000	0	0	0	219.200.000	219.200.000	0	0	0	219.200.000	0		
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		176.555.800	0	0	0	176.555.800	176.555.800	0	0	0	176.555.800	0		
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		13.543.000	106.617.400	0	0	120.160.400	57.207.000	62.953.400	0	0	120.160.400	0		
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17.797.215	0	0	0	17.797.215	17.797.215	0	0	0	17.797.215	0		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		131.521.800	1.812.400	0	0	133.334.200	133.334.200	0	0	0	133.334.200	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		32.206.900	5.910.000	0	0	38.116.900	38.116.900	0	0	0	38.116.900	0		
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		9.777.700	0	0	0	9.777.700	9.777.700	0	0	0	9.777.700	0		
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		117.998.914	0	0	0	117.998.914	99.598.914	0	0	0	99.598.914	(18.400.000)		
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		36.343.901	0	0	0	36.343.901	36.343.901	0	0	0	36.343.901	0		
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		360.822.182	0	0	0	360.822.182	248.262.262	0	0	0	248.262.262	(112.559.920)		
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17.450.000	0	0	0	17.450.000	17.450.000	0	0	0	17.450.000	0		
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17.056.100	0	0	0	17.056.100	17.056.100	0	0	0	17.056.100	0		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				152.673.800	0	0	0	152.673.800	152.673.800	0	0	0	152.673.800	0		
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		152.673.800	0	0	0	152.673.800	152.673.800	0	0	0	152.673.800	0		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				12.125.384.321	0	0	0	12.125.384.321	12.057.806.721	0	0	0	12.057.806.721	(67.577.600)		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				12.125.384.321	0	0	0	12.125.384.321	12.057.806.721	0	0	0	12.057.806.721	(67.577.600)		
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		656.299.600	0	0	0	656.299.600	614.829.400	0	0	0	614.829.400	(41.470.200)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Uraian	Belang Uraian	Program	Kegiatan	Sub kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		11.389.084.721	0	0	0	11.389.084.721	11.362.977.321	0	0	0	11.362.977.321	(26.107.400)	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2.059.200.000	0	0	0	2.059.200.000	2.038.100.000	0	0	0	2.038.100.000	(21.100.000)	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2.059.200.000	0	0	0	2.059.200.000	2.038.100.000	0	0	0	2.038.100.000	(21.100.000)	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		2.059.200.000	0	0	0	2.059.200.000	2.038.100.000	0	0	0	2.038.100.000	(21.100.000)	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				72.963.300	0	0	0	72.963.300	72.963.300	0	0	0	72.963.300	0	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				72.963.300	0	0	0	72.963.300	72.963.300	0	0	0	72.963.300	0	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		72.963.300	0	0	0	72.963.300	72.963.300	0	0	0	72.963.300	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Garut, tanggal 20 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial </
----------------------------------	--	--

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															Formulir RKPA-BELANJA SKPD							
Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023																						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																						
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1		
									T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				25,349,722,138	1,782,586,844	0	0	27,132,308,982	26,160,582,848	1,676,394,994	0	0	27,836,977,842	704.668.860			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,777,675,405	1,668,247,044	0	0	8,445,922,449	6,481,509,535	1,613,441,594	0	0	8,094,951,129	(350.971.320)			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				428,676,115	0	0	0	428,676,115	326,756,915	0	0	0	326,756,915	(101.919.200)			
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		298,543,893	0	0	0	298,543,893	203,624,693	0	0	0	203,624,693	(94.919.200)			
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		130,132,222	0	0	0	130,132,222	123,132,222	0	0	0	123,132,222	(7.000.000)			
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,221,194,132	0	0	0	5,221,194,132	4,968,417,112	0	0	0	4,968,417,112	(252.777.020)			
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		5,181,244,132	0	0	0	5,181,244,132	4,928,467,112	0	0	0	4,928,467,112	(252.777.020)			
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		39,950,000	0	0	0	39,950,000	39,950,000	0	0	0	39,950,000	0			
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				149,058,809	0	0	0	149,058,809	149,058,809	0	0	0	149,058,809	0			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T +1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		149,058,809	0	0	0	149,058,809	149,058,809	0	0	0	149,058,809	0		
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84,089,000	0	0	0	84,089,000	117,773,800	0	0	0	117,773,800	33.684.800		
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		54,089,000	0	0	0	54,089,000	66,038,000	0	0	0	66,038,000	11.949.000		
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		30,000,000	0	0	0	30,000,000	51,735,800	0	0	0	51,735,800	21.735.800		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				348,040,399	20,911,800	0	0	368,952,199	370,627,149	1,350,000	0	0	371,977,149	3.024.950		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		25,588,400	0	0	0	25,588,400	25,588,400	0	0	0	25,588,400	0		
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		80,746,500	0	0	0	80,746,500	80,746,500	0	0	0	80,746,500	0		
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		40,186,999	0	0	0	40,186,999	41,861,949	1,350,000	0	0	43,211,949	3.024.950		
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		4,375,500	20,911,800	0	0	25,287,300	25,287,300	0	0	0	25,287,300	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		39,968,500	0	0	0	39,968,500	39,968,500	0	0	0	39,968,500	0		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		157,174,500	0	0	0	157,174,500	157,174,500	0	0	0	157,174,500	0		
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60,680,000	1,647,335,244	0	0	1,708,015,244	62,938,800	1,612,091,594	0	0	1,675,030,394	(32.984.850)		
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		4,800,000	870,270,000	0	0	875,070,000	4,800,000	784,552,450	0	0	789,352,450	(85.717.550)		
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		0	0	0	0	0	1,680,000	35,500,000	0	0	37,180,000	37.180.000		
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		42,080,000	336,314,200	0	0	378,394,200	42,658,800	351,288,100	0	0	393,946,900	15.552.700		
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		13,800,000	440,751,044	0	0	454,551,044	13,800,000	440,751,044	0	0	454,551,044	0		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				345,866,950	0	0	0	345,866,950	345,866,950	0	0	0	345,866,950	0		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1,995,200	0	0	0	1,995,200	1,995,200	0	0	0	1,995,200	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		121,515,000	0	0	0	121,515,000	121,515,000	0	0	0	121,515,000	0		
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		42,450,000	0	0	0	42,450,000	42,450,000	0	0	0	42,450,000	0		
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		179,906,750	0	0	0	179,906,750	179,906,750	0	0	0	179,906,750	0		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140,070,000	0	0	0	140,070,000	140,070,000	0	0	0	140,070,000	0		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		140,070,000	0	0	0	140,070,000	140,070,000	0	0	0	140,070,000	0		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2,902,351,800	0	0	0	2,902,351,800	4,260,016,350	0	0	0	4,260,016,350	1.357.664.550		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				2,902,351,800	0	0	0	2,902,351,800	4,260,016,350	0	0	0	4,260,016,350	1.357.664.550		
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		68,965,400	0	0	0	68,965,400	65,582,400	0	0	0	65,582,400	(3.383.000)		
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1,050,591,800	0	0	0	1,050,591,800	1,047,891,000	0	0	0	1,047,891,000	(2.700.800)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		119,139,400	0	0	0	119,139,400	119,139,400	0	0	0	119,139,400	0	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		231,550,000	0	0	0	231,550,000	1,622,948,000	0	0	0	1,622,948,000	1.391.398.000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1,432,105,200	0	0	0	1,432,105,200	1,404,455,550	0	0	0	1,404,455,550	(27.649.650)	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				109,200,000	0	0	0	109,200,000	26,813,150	0	0	0	26,813,150	(82.386.850)	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				109,200,000	0	0	0	109,200,000	26,813,150	0	0	0	26,813,150	(82.386.850)	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		109,200,000	0	0	0	109,200,000	26,813,150	0	0	0	26,813,150	(82.386.850)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Asal (Dinas Sosial)																
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,302,947,312	114,339,800	0	0	1,417,287,112	1,223,373,792	62,953,400	0	0	1,286,327,192	(130.959.920)		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1,150,273,512	114,339,800	0	0	1,264,613,312	1,070,699,992	62,953,400	0	0	1,133,653,392	(130.959.920)		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		219,200,000	0	0	0	219,200,000	219,200,000	0	0	0	219,200,000	0		
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		176,555,800	0	0	0	176,555,800	176,555,800	0	0	0	176,555,800	0		
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		13,543,000	106,617,400	0	0	120,160,400	57,207,000	62,953,400	0	0	120,160,400	0		
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17,797,215	0	0	0	17,797,215	17,797,215	0	0	0	17,797,215	0		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		131,521,800	1,812,400	0	0	133,334,200	133,334,200	0	0	0	133,334,200	0		
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		32,206,900	5,910,000	0	0	38,116,900	38,116,900	0	0	0	38,116,900	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T +1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Masyarakat (Dinas Sosial)															
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		9,777,700	0	0	0	9,777,700	9,777,700	0	0	0	9,777,700	0	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		117,998,914	0	0	0	117,998,914	99,598,914	0	0	0	99,598,914	(18.400.000)	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		36,343,901	0	0	0	36,343,901	36,343,901	0	0	0	36,343,901	0	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		360,822,182	0	0	0	360,822,182	248,262,262	0	0	0	248,262,262	(112.559.920)	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17,450,000	0	0	0	17,450,000	17,450,000	0	0	0	17,450,000	0	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17,056,100	0	0	0	17,056,100	17,056,100	0	0	0	17,056,100	0	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				152,673,800	0	0	0	152,673,800	152,673,800	0	0	0	152,673,800	0	
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kab. Garut, Tarogong		152,673,800	0	0	0	152,673,800	152,673,800	0	0	0	152,673,800	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Umum	Kidul, Sukagalih														
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				12,125,384,321	0	0	0	12,125,384,321	12,057,806,721	0	0	0	12,057,806,721	(67.577.600)		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				12,125,384,321	0	0	0	12,125,384,321	12,057,806,721	0	0	0	12,057,806,721	(67.577.600)		
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		656,299,600	0	0	0	656,299,600	614,829,400	0	0	0	614,829,400	(41.470.200)		
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		11,389,084,721	0	0	0	11,389,084,721	11,362,977,321	0	0	0	11,362,977,321	(26.107.400)		
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2,059,200,000	0	0	0	2,059,200,000	2,038,100,000	0	0	0	2,038,100,000	(21.100.000)		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2,059,200,000	0	0	0	2,059,200,000	2,038,100,000	0	0	0	2,038,100,000	(21.100.000)		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		2,059,200,000	0	0	0	2,059,200,000	2,038,100,000	0	0	0	2,038,100,000	(21.100.000)		
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				72,963,300	0	0	0	72,963,300	72,963,300	0	0	0	72,963,300	0		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				72,963,300	0	0	0	72,963,300	72,963,300	0	0	0	72,963,300	0		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		72,963,300	0	0	0	72,963,300	72,963,300	0	0	0	72,963,300	0		

Plafon dan Program Kegiatan, Sub Kegiatan Sekala Prioritas Perubahan SKPD Dinas Sosial Kab. Garut Tahun 2023

No.					Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	4.756.885.175,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	4.756.885.175,00	
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Lap	39.950.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Lap	39.950.000,00	
1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	80,00	148.987.909,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	80,00	148.987.909,00	
1	06	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bln	148.987.909,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bln	148.987.909,00	
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN	82,00	21.468.300,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN	82,00	21.468.300,00	
1	06	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	1 paket	21.468.300,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	1 paket	21.468.300,00	
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi	82,00	408.582.,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi	82,00	408.582.,00	
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	1 Paket	41.819.850,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	1 Paket	41.819.850,00	

No.					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor & alat tulis kantor yang tersedia	2352 buah	77.277.666,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor & alat tulis kantor yang tersedia	2352	77.277.666,00	
1	06	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah Peralatan rumah tangga yang dibeli	1 paket	58.371.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah Peralatan rumah tangga yang dibeli	1 paket	58.371.500,00	
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	1 paket	75.484.150,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	1 paket	75.484.150,00	
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlanggaran	1 paket	21.540.350,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlanggaran	1 paket	21.540.350,00	
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jamuan makan tamu ;	260 Org ;	20.850.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jamuan makan tamu ;	260 Org ;	20.850.000,00	
							Jamuan makan minum rapat dinas	270 Org				Jamuan makan minum rapat dinas	270 Org		
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Fasilitasi rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan ke dalam daerah	1 Tahun	113.239.070,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Fasilitasi rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan ke dalam daerah	1 Tahun	113.239.070,00	
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya	80,00	360.844.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya	80,00	360.844.200,00	
1	06	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang dibeli (roda dua)	2 Unit	71.680.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang dibeli (roda dua)	2 Unit	71.680.000,00	
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang menunjang kinerja ASN	19 Unit	289.164.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang menunjang kinerja ASN	19 Unit	289.164.200,00	
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase kinerja ASN dalam melaksanakan tugas administrasi	82,45%	230.708.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase kinerja ASN dalam melaksanakan tugas administrasi	82,45%	230.708.600,00	
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya jasa surat menyurat	236 Buah	2.596.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya jasa surat menyurat	236 Buah	2.596.000,00	
1	06	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	62 buah	41.850.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	62 buah	41.850.000,00	
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bin	186.262.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bin	186.262.600,00	
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pemeliharaan saran dan prasarana untuk keancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	81,35%	157.554.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pemeliharaan saran dan prasarana untuk keancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	81,35%	157.554.900,00	
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	12 Unit	20.250.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	12 Unit	20.250.000,00	

No.					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang terpelihara	2 unit	89.350.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang terpelihara	2 unit	89.350.000,00	
1	06	01	2,06	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Sarana dan parasarana gedung kantor yang terpelihara	1 paket	47.954.900,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Sarana dan parasarana gedung kantor yang terpelihara	1 paket	47.954.900,00	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase PPKS/PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	24.26%	2.333.482.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase PPKS/PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	24.26%	2.333.482.500,00	
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam peningkatan kesejahteraan sosial.	30.31%	2.333.482.500,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam peningkatan kesejahteraan sosial.	30.31%	2.333.482.500,00	
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PSM yang mengikuti pengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	105 PSM	87.400.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PSM yang mengikuti pengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	105 PSM	87.400.000,00	
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	42 Org	720.300.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	umlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	42 Org	720.300.000,00	
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial.	13 Org Janda PKRI.	151.362.600,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial.	13 Org Janda PKRI.	151.362.600,00	
							Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial WRSE &Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga)	80 Org WRSE				Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial WRSE &Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga)	80 Org WRSE		

No.					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah KT, yang mengikuti peningkatan kemampuan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	50 KT ;	200.419.900,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah KT, yang mengikuti peningkatan kemampuan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	50 KT ;	200.419.900,00	
							Jumlah LKS, yang mengikuti peningkatan kemampuan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	25 LKS				Jumlah LKS, yang mengikuti peningkatan kemampuan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	25 LKS		
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah masyarakat miskin yang dilayani melalui (LAPAD RUHAMA) dan LK3	442 Ds/Kel	1.174.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah masyarakat miskin yang dilayani melalui (LAPAD RUHAMA) dan LK3	442 Ds/Kel	1.174.000.000,00	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	30.25%	146.738.000,00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	30.25%	146.738.000,00	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	30.25%	146.738.000,00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	30.25%	146.738.000,00	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah warga negara migran yang terfasilitasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal, serta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	47 Org	146.738.000,00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah warga negara migran yang terfasilitasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal, serta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	47 Org	146.738.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di luar Panti	30.11%	774.177.800,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di luar Panti	30.11%	774.177.800,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	32.06%	774.177.800,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	32.06%	774.177.800,00	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	240 Org	175.650.800,00	Penyediaan Permakanan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	240 Org	175.650.800,00	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	240 Org	108.281.800,00	Penyediaan Sandang	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	240 Org	108.281.800,00	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	45 Org	100.000.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	45 Org	100.000.000,00	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reunifikasi	60 Org	18.485.400,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reunifikasi	60 Org	18.485.400,00	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbingan sosial, Fisik, mental, Spiritual dan sosial	50 Org	207.854.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbingan sosial, Fisik, mental, Spiritual dan sosial	50 Org	207.854.000,00	

No.					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan sosial bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar	120 org	61.062.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan sosial bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar	120 org	61.062.000,00	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitas NIK, Surat Nikah, dan KIA	60 Org	18.972.800,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitas NIK, Surat Nikah, dan KIA	60 Org	18.972.800,00	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	200 Org	54.642.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	200 Org	54.642.000,00	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	38 Org	11.669.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	38 Org	11.669.000,00	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rujukan	59 Org	17.500.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rujukan	59 Org	17.500.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya	17.10%		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya	17.10%		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelaksanaan verfal data Fakir Miskin pada DTKS dan BANSOS	33.33%		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelaksanaan verfal data Fakir Miskin pada DTKS dan BANSOS	33.33%		
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah pengelolaan data FM yang valid pada dokumen data	1 dok	747.128.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah pengelolaan data FM yang valid pada dokumen data	1 dok	747.128.000,00	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jlh masyarakat miskin yg mendapatkanfasilitasi pendampingan BPNT bagi KPM;	50 Org AGEN	13.612.490.148,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jlh masyarakat miskin yg mendapatkanfasilitasi pendampingan BPNT bagi KPM;	50 Org AGEN	13.612.490.148,00	
							Jlh masyarakat miskin yg mendapatkan fasilitas pendampingan PKH	502 Org				Jlh masyarakat miskin yg mendapatkan fasilitas pendampingan PKH	502 Org		

No.					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
							Jlh masyarakat miskin yg mendapatkan bantuan uang	8445 Org				Jlh masyarakat miskin yg mendapatkan bantuan uang	8445 Org		
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah keluarga miskin yang dilatih bidang perekonomian bagi FM pesisir/perkotaan dan pedesaan	100 Org	167.813.900,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah keluarga miskin yang dilatih bidang perekonomian bagi FM pesisir/perkotaan dan pedesaan	100 Org	167.813.900,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial .	100%	1.813.949.750,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial .	100%	1.813.949.750,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial masa tanggap darurat Kabupaten/Kota	100%	859.785.550,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial masa tanggap darurat Kabupaten/Kota	100%	859.785.550,00	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar	2465 Jiwa	859.785.550,00	Penyediaan Makanan	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar	2465 Jiwa	859.785.550,00	

No.					Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan terhadap kesiap siagaan bencana	29.28%	954.164.200,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan terhadap kesiap siagaan bencana	29.28%	954.164.200,00	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	umlah taruna siaga bencana yang dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana alam dan sosial.	56 org.	954.164.200,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	umlah taruna siaga bencana yang dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana alam dan sosial.	56 org.	954.164.200,00	
							Jumlah orang terlanter dalam perjalanan yang dapat dibantu	100 Org				Jumlah orang terlanter dalam perjalanan yang dapat dibantu	100 Org		
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	75%	50.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	75%	50.000.000,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pemeliharaan makam pahlawan nasional Kab Garut	75%	50.000.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Persentase pemeliharaan makam pahlawan nasional Kab Garut	75%	50.000.000,00	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara	1 Paket	50.000.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kel.Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara	1 Paket	50.000.000,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah (tujuh) Program dan (empat belas) Kegiatan dan (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan Perubahan rencana kerja Tahun 2023 di SKPD Dinas Sosial Kabupaten Garut sebesar Rp. 27.836.977.842,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut/ serta sumberdana DBHCHT, lalu Sebesar Rp. 0,00 Yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (Bankeu Prop) dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 82,45%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.094.951.129,-
- Keluaran : 1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun ;
2. Tersedianya dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP);
3. Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja (IKM, LPPD);
4. Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN;
5. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
6. Penyediaan jasa keamanan kantor
7. Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan
8. Jumlah peralatan listrik yang tersedia
- Hasil : Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kinerja ASN Dinas Sosial

1. 2. Program Pemberdayaan Sosial

Capaian Program	: Persentase PPKS/PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial 24,26%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 4.260.016.350,-
Keluaran	: 1. Jumlah PSM yang mengikuti pengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2. Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial; 3. Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial; 4. Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial WRSE & Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga; 5. Jumlah KT, yang mengikuti peningkatan kemampuan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 6. Jumlah LKS, yang mengikuti peningkatan kemampuan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ; 7. Jumlah masyarakat miskin yang dilayani melalui (LAPAD RUHAMA) dan LK3
Hasil	: Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat ;

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Capaian Program	: Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 30.25%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 26.813.150,-
Keluaran	: Jumlah warga negara migran yang terfasilitasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal, serta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan;
Hasil	: Meningkatnya warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Fasilitas bagi Kelompok Rentan ;

4. Program Rehabilitasi Sosial

Capaian Program	: Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di luar Panti 30.11%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 1.286.327.192,-
Keluaran	: 1. Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar; 2. Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar ; 3. Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu; 4. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reunifikasi ; 5. Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbingan sosial, Fisik, mental, Spiritual dan sosial ; 6. Jumlah PPKS yaang mendapatkan bimbingan sosial bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar ; 7. Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi NIK, Surat Nikah, dan KIA
Hasil	: Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Fasilitas bagi Kelompok Rentan ;

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian Program	: Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya, 17.10%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 12.057.806.721,-
Keluaran	: 1. Jumlah pengelolaan data FM yang valid pada dokumen data ; 2. Jumlah masyarakat miskin yg mendapatkanfasilitasi pendampingan BPNT bagi KPM; 3. Jlh massyarakat miskin yg mendapatkan fasilitas pendampingan PKH: 4. Jlh masyarakat miskin yg mendapatkan bantuan uang; 5. Jumlah keluarga miskin yang dilaatih bidang perekonomian bagi FM pesisir/perkotaan dan pedesaan.
Hasil	: Meningkatnya pelaksanaan verfal data DTKS dan BANSOS.
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatnya kualitas pengembangan ekonomi masyarakat ;

6. Program Penanganan Bencana

Capaian Program	: Persentase pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial, 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 2.038.100.000,-
Keluaran	: 1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar ; 2. Jumlah taruna siaga bencana yang dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana alam dan sosial; 3. Jumlah orang terlantar dalam perjalanan yang dapat dibantu.
Hasil	: Tersedianya bahan bantuan bagi korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebencanaan bencana alam dan bencana sosial, selama tanggap darurat.

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Capaian Program : Persentase pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan, 75%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 72.963.300,-
- Keluaran : Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara;
- Hasil : Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan.
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Fasilitas bagi Kelompok Rentan ;

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															Formulir RKPA-BELANJA SKPD					
Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023																				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				25,349,722,138	1,782,586,844	0	0	27,132,308,982	26,160,582,848	1,676,394,994	0	0	27,836,977,842	704.668.860	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,777,675,405	1,668,247,044	0	0	8,445,922,449	6,481,509,535	1,613,441,594	0	0	8,094,951,129	(350.971.320)	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				428,676,115	0	0	0	428,676,115	326,756,915	0	0	0	326,756,915	(101.919.200)	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		298,543,893	0	0	0	298,543,893	203,624,693	0	0	0	203,624,693	(94.919.200)	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		130,132,222	0	0	0	130,132,222	123,132,222	0	0	0	123,132,222	(7.000.000)	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,221,194,132	0	0	0	5,221,194,132	4,968,417,112	0	0	0	4,968,417,112	(252.777.020)	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		5,181,244,132	0	0	0	5,181,244,132	4,928,467,112	0	0	0	4,928,467,112	(252.777.020)	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		39,950,000	0	0	0	39,950,000	39,950,000	0	0	0	39,950,000	0	
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				149,058,809	0	0	0	149,058,809	149,058,809	0	0	0	149,058,809	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T +1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		149,058,809	0	0	0	149,058,809	149,058,809	0	0	0	149,058,809	0	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84,089,000	0	0	0	84,089,000	117,773,800	0	0	0	117,773,800	33.684.800	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		54,089,000	0	0	0	54,089,000	66,038,000	0	0	0	66,038,000	11.949.000	
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		30,000,000	0	0	0	30,000,000	51,735,800	0	0	0	51,735,800	21.735.800	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				348,040,399	20,911,800	0	0	368,952,199	370,627,149	1,350,000	0	0	371,977,149	3.024.950	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		25,588,400	0	0	0	25,588,400	25,588,400	0	0	0	25,588,400	0	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		80,746,500	0	0	0	80,746,500	80,746,500	0	0	0	80,746,500	0	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		40,186,999	0	0	0	40,186,999	41,861,949	1,350,000	0	0	43,211,949	3.024.950	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		4,375,500	20,911,800	0	0	25,287,300	25,287,300	0	0	0	25,287,300	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		39,968,500	0	0	0	39,968,500	39,968,500	0	0	0	39,968,500	0		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		157,174,500	0	0	0	157,174,500	157,174,500	0	0	0	157,174,500	0		
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60,680,000	1,647,335,244	0	0	1,708,015,244	62,938,800	1,612,091,594	0	0	1,675,030,394	(32.984.850)		
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		4,800,000	870,270,000	0	0	875,070,000	4,800,000	784,552,450	0	0	789,352,450	(85.717.550)		
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		0	0	0	0	0	1,680,000	35,500,000	0	0	37,180,000	37.180.000		
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		42,080,000	336,314,200	0	0	378,394,200	42,658,800	351,288,100	0	0	393,946,900	15.552.700		
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		13,800,000	440,751,044	0	0	454,551,044	13,800,000	440,751,044	0	0	454,551,044	0		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				345,866,950	0	0	0	345,866,950	345,866,950	0	0	0	345,866,950	0		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1,995,200	0	0	0	1,995,200	1,995,200	0	0	0	1,995,200	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	06	01		2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		121,515,000	0	0	0	121,515,000	121,515,000	0	0	0	121,515,000	0	
1	06	01		2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		42,450,000	0	0	0	42,450,000	42,450,000	0	0	0	42,450,000	0	
1	06	01		2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		179,906,750	0	0	0	179,906,750	179,906,750	0	0	0	179,906,750	0	
1	06	01		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140,070,000	0	0	0	140,070,000	140,070,000	0	0	0	140,070,000	0	
1	06	01		2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		140,070,000	0	0	0	140,070,000	140,070,000	0	0	0	140,070,000	0	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2,902,351,800	0	0	0	2,902,351,800	4,260,016,350	0	0	0	4,260,016,350	1.357.664.550	
1	06	02		2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					2,902,351,800	0	0	0	2,902,351,800	4,260,016,350	0	0	0	4,260,016,350	1.357.664.550	
1	06	02		2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		68,965,400	0	0	0	68,965,400	65,582,400	0	0	0	65,582,400	(3.383.000)	
1	06	02		2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1,050,591,800	0	0	0	1,050,591,800	1,047,891,000	0	0	0	1,047,891,000	(2.700.800)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		119,139,400		0	0	0	119,139,400	119,139,400	0	0	0	119,139,400	0
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		231,550,000		0	0	0	231,550,000	1,622,948,000	0	0	0	1,622,948,000	1.391.398.000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		1,432,105,200		0	0	0	1,432,105,200	1,404,455,550	0	0	0	1,404,455,550	(27.649.650)
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				109,200,000		0	0	0	109,200,000	26,813,150	0	0	0	26,813,150	(82.386.850)
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				109,200,000		0	0	0	109,200,000	26,813,150	0	0	0	26,813,150	(82.386.850)
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		109,200,000		0	0	0	109,200,000	26,813,150	0	0	0	26,813,150	(82.386.850)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Asal (Dinas Sosial)															
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,302,947,312	114,339,800	0	0	1,417,287,112	1,223,373,792	62,953,400	0	0	1,286,327,192	(130.959.920)	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1,150,273,512	114,339,800	0	0	1,264,613,312	1,070,699,992	62,953,400	0	0	1,133,653,392	(130.959.920)	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		219,200,000	0	0	0	219,200,000	219,200,000	0	0	0	219,200,000	0	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		176,555,800	0	0	0	176,555,800	176,555,800	0	0	0	176,555,800	0	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		13,543,000	106,617,400	0	0	120,160,400	57,207,000	62,953,400	0	0	120,160,400	0	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17,797,215	0	0	0	17,797,215	17,797,215	0	0	0	17,797,215	0	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		131,521,800	1,812,400	0	0	133,334,200	133,334,200	0	0	0	133,334,200	0	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		32,206,900	5,910,000	0	0	38,116,900	38,116,900	0	0	0	38,116,900	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Masyarakat (Dinas Sosial)															
1	06	04	2.01	07	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		9,777,700	0	0	0	9,777,700	9,777,700	0	0	0	9,777,700	0	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		117,998,914	0	0	0	117,998,914	99,598,914	0	0	0	99,598,914	(18.400.000)	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		36,343,901	0	0	0	36,343,901	36,343,901	0	0	0	36,343,901	0	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		360,822,182	0	0	0	360,822,182	248,262,262	0	0	0	248,262,262	(112.559.920)	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17,450,000	0	0	0	17,450,000	17,450,000	0	0	0	17,450,000	0	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		17,056,100	0	0	0	17,056,100	17,056,100	0	0	0	17,056,100	0	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				152,673,800	0	0	0	152,673,800	152,673,800	0	0	0	152,673,800	0	
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kab. Garut, Tarogong		152,673,800	0	0	0	152,673,800	152,673,800	0	0	0	152,673,800	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Umum	Kidul, Sukagalih													
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				12,125,384,321	0	0	0	12,125,384,321	12,057,806,721	0	0	0	12,057,806,721	(67.577.600)	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				12,125,384,321	0	0	0	12,125,384,321	12,057,806,721	0	0	0	12,057,806,721	(67.577.600)	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		656,299,600	0	0	0	656,299,600	614,829,400	0	0	0	614,829,400	(41.470.200)	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		11,389,084,721	0	0	0	11,389,084,721	11,362,977,321	0	0	0	11,362,977,321	(26.107.400)	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2,059,200,000	0	0	0	2,059,200,000	2,038,100,000	0	0	0	2,038,100,000	(21.100.000)	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2,059,200,000	0	0	0	2,059,200,000	2,038,100,000	0	0	0	2,038,100,000	(21.100.000)	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		2,059,200,000	0	0	0	2,059,200,000	2,038,100,000	0	0	0	2,038,100,000	(21.100.000)	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				72,963,300	0	0	0	72,963,300	72,963,300	0	0	0	72,963,300	0	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				72,963,300	0	0	0	72,963,300	72,963,300	0	0	0	72,963,300	0	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		72,963,300	0	0	0	72,963,300	72,963,300	0	0	0	72,963,300	0	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk mencapai keselarasan yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang tentunya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, target kinerja yang sudah ditetapkan dan untuk mengakomodir pendanaan DAK dan Banku Propinsi.

Dokumen Perencanaan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan/SKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Sosisl Kabupaten Garut serta peran aktif *stakeholder* dalam mencapai target kinerja serta tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN